



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran  
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>  
 Volume 8 Nomor 4, 2025  
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/11/2025  
 Reviewed : 05/12/2025  
 Accepted : 10/12/2025  
 Published : 22/12/2025

Naila Fayza Haq Faqih<sup>1</sup>  
 Thania Emiliana<sup>2</sup>  
 Aimar Habibi Nugraha<sup>3</sup>  
 Rudiana<sup>4</sup>

## ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM SPALD DI KOTA CIMAH BERDASARKAN TEORI JOSEF RIWU KAH

### Abstrak

Air limbah domestik adalah air limbah yang bersumber dari kegiatan harian manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Air limbah domestik berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Dari hal-hal tersebut, air limbah domestik kemudian dapat dihasilkan dari toilet, kamar mandi, wastafel cuci tangan, maupun wastafel cuci piring. Penelitian ini secara mendalam menganalisis mengenai implementasi program SPALD yang ada di Kota Cimahi dengan berdasarkan pada faktor-faktor dari teori Josef Riwu Kaho. Melalui kajian kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi program SPALD yang telah dijalankan dan bagaimana perspektifnya jika dilihat dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi implementasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pemahaman tentang SPALD khususnya di Kota Cimahi belum merata ke seluruh bagian masyarakat, maka dari itu harus ada program-program yang dijalankan supaya masyarakat lebih sadar akan pentingnya pengelolaan limbah air domestik.

**Kata Kunci:** Air limbah domestik, SPALD, air bersih dan sanitasi, faktor implementasi, pemerintahan daerah.

### Abstract

Domestic wastewater is wastewater that comes from daily human activities related to water use. Domestic wastewater comes from businesses and/or residential activities, restaurants, offices, shops, apartments, and dormitories. From these sources, domestic wastewater can come from toilets, bathrooms, hand washing sinks, and dishwashing sinks. This study thoroughly analyzes the implementation of the SPALD program in Cimahi City based on factors from Josef Riwu Kaho's theory. Through qualitative analysis, this study identifies the SPALD program that has been implemented and how it is viewed from various factors that can influence its implementation. The results of the study show that understanding of SPALD, especially in Cimahi City, is not yet widespread throughout the community. Therefore, programs must be implemented to make the community more aware of the importance of domestic wastewater management

**Keywords:** Domestic wastewater, SPALD, clean water and sanitation, implementation factors, local government.

### PENDAHULUAN

Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi berada pada poin keenam yang menegaskan mengenai pentingnya menjamin ketersediaan air bersih serta sistem sanitasi yang berkelanjutan agar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tertulis bahwa, terdapatnya urusan pemerintahan

<sup>1,2,3</sup>) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
 email: naila24008@mail.unpad.ac.id<sup>1</sup>, thania24001@mail.unpad.ac.id<sup>2</sup>, aimar24001@mail.unpad.ac.id<sup>3</sup>,  
 rudiana2017@unpad.ac.id<sup>4</sup>

konkuren yang dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Pasal 12 disebutkan pula bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Hal ini yang mendasari bahwa kebutuhan air bersih dan sanitasi termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan poin D. Tertulis pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat yang menyebutkan bahwa rumah layak huni adalah rumah yang memiliki indikator-indikator berikut:

- a. Ketahanan bangunan;
- b. Menyediakan fungsi-fungsi ruang mendasar untuk 4 (empat) jiwa sesuai dengan standar 9 m<sup>2</sup> (sembilan meter persegi) per jiwa;
- c. Akses layak air limbah domestik; dan
- d. Akses air minum.

Disamping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juga menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas untuk menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota. Hal tersebut, termasuk mengenai kebutuhan air pula, yang di mana kebutuhan air dibagi menjadi dua kebutuhan, yakni domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik merupakan kebutuhan yang berdasarkan pada jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Sedangkan kebutuhan non domestik merupakan kebutuhan yang menjadi penunjang kota atau kegiatan komersial seperti industri, perkantoran, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah.

Kota Cimahi sebagai wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan tersendiri dalam pengelolaan air limbah domestik. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya aktivitas perkotaan menyebabkan volume limbah cair rumah tangga semakin meningkat, sehingga berpotensi menurunkan kualitas air bersih dan mencemari lingkungan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024 tentang RPJP 2025-2045 Kota Cimahi dalam poin Layanan Air Limbah Domestik Layak dan Aman, yang menyebutkan bahwa sanitasi dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, di mana kondisi ini akan menimbulkan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari penurunan kualitas lingkungan hidup masyarakat, meningkatnya jumlah diare, dan juga munculnya berbagai penyakit.

Dalam mencegah terjadinya dampak-dampak tersebut, Pemerintah Kota Cimahi berusaha meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah melalui pelayanan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, septic tank individu, dan juga Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). SPALD yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di Kota Cimahi sekaligus mendukung pencapaian SDGs tujuan keenam nyatanya masih memiliki keterbatasan dalam pemilihan lahan, pembiayaan, dan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Apabila air limbah domestik maupun non domestik ini dikelola dengan baik dapat menjangkau penduduk maka dapat meminimalisir penurunan kualitas air sungai.

Menurut Josef Riwu Kaho, untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, terdapat beberapa faktor yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi keberhasilan. Di mana dalam teorinya, Josef menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang memengaruhi implementasi untuk mendukung pelaksanaan program, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen. Kerangka ini relevan untuk digunakan dalam konteks menganalisis implementasi SPALD di Kota Cimahi karena mencakup berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan air limbah domestik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai air bersih dan sanitasi layak dengan pembahasan SPALD di Kota Cimahi. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu menggali data secara komprehensif terkait proses pelaksanaan program, peran pemerintah daerah, serta faktor yang memengaruhi penerapan program SPALD. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), UPTD SPALD, serta masyarakat. Observasi yang dilakukan saat lapangan dan dokumen-dokumen hasil wawancara yang digunakan untuk memperkuat data dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD.

Seluruh data ini kemudian dianalisis menggunakan kerangka analisis yang mengacu pada teori Faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah menurut Josef Riwu Kaho. Dengan adanya observasi lapangan dan dokumen-dokumen wawancara diharapkan hasil tersebut dapat dikaitkan dengan kerangka analisis tersebut dengan judul faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi program SPALD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik atau SPALD adalah proyek yang dirancang untuk mengelola air limbah rumah tangga secara efisien dan ramah lingkungan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas air dan melindungi kesehatan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2018 (Cjmahi et al. 2009, 4), SPALD merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. UPTD SPALD di Kota Cimahi sendiri, dinaungi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

Menurut data yang kami peroleh dari hasil wawancara bersama Ibu Septinar selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD SPALD Kota Cimahi, UPT Air Limbah pertama kali dibangun pada tahun 2014. Di mana pada saat itu dinas yang menaunginya masih dikenal dengan nama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), bukan DPKP. Di dalam DKP terdapat sebuah bidang yang dikenal sebagai ABAL, singkatan dari Air Bersih dan Air Limbah. Bidang ABAL ini terbagi menjadi dua seksi, yakni seksi air bersih dan seksi air limbah. Seiring berjalannya waktu, khususnya pada seksi air limbah, tantangan dalam hal sanitasi semakin meningkat dan menjadi perhatian yang lebih serius.

Berdasarkan penuturan dari Ibu Septinar, saat itu Kota Cimahi sedang berada dalam periode kepemimpinan Wali kota yang juga memiliki peran sebagai duta sanitasi dan memiliki *concern* terhadap air limbah, yaitu Bapak Itoc, sehingga fokus terhadap pengelolaan air limbah mengalami peningkatan signifikan. Kepedulian Walikota terhadap isu sanitasi air limbah mendorong munculnya usulan untuk melakukan pengelolaan yang lebih terperinci dan teknis terhadap aspek tersebut. Oleh karena itu, dilakukan pengajuan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai perpanjangan tangan di bidang teknis. Pembentukan UPT ini bertujuan agar pelaksanaan program dan perencanaan di bidang air limbah dapat dijalankan secara lebih efektif dan terarah. Seiring perkembangan waktu, istilah UPT mengalami beberapa perubahan nomenklatur, dimulai dari UPT (Unit Pelaksana Teknis), kemudian menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), dan akhirnya berubah menjadi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) sesuai dengan Peraturan Wali kota yang berlaku. Perubahan istilah ini mencerminkan penyesuaian struktur organisasi sesuai dengan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efisien.

Secara keseluruhan, pembentukan dan perkembangan unit teknis ini merupakan respons adaptif terhadap kebutuhan pengelolaan sumber daya air dan sanitasi yang semakin kompleks, sambil menekankan pentingnya keterpaduan antara perencanaan program dan pelaksanaan teknis. Penataan organisasi yang efektif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang kebersihan, sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program SPALD ini terdapat dua jenis dari SPALD itu sendiri, yaitu SPALD-S (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat) dan juga SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat). SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sedangkan SPALD-T adalah sistem yang mengumpulkan air limbah di satu komunal yang terpusat dan terhubung dengan beberapa rumah.

Dalam pembangunan prasarana SPALD ini pemerintah Kota Cimahi juga memiliki suatu program yang namanya SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) (PPID Kota Cimahi 2024, 5). Program SANIMAS ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi seluruh warga masyarakat. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan. Pada tahun 2024 ini, terdapat 12 lokasi yang berada di 8 kelurahan yang melaksanakan program pembangunan dana alokasi khusus di Kota Cimahi meliputi Kelurahan Baros, Cipageran, Citeureup, Cibabat, Pasir kaliki, Cibeber, Melong dan Kelurahan Utama. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, Endang, dalam laporannya menyebutkan jumlah sarana yang terbangun dari program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024:

1. Pembangunan SPALD-S DAK : 490 Rumah Tangga
2. Pembangunan SPALD-T DAK : 271 Sambungan Rumah
3. Rehab/ Penambahan Ruang MCK : 40 Rumah Tangga
4. Pembangunan Tangki Septik Individual/Komunal DIF : 124 Sambungan Rumah
5. Pembangunan SPALD CSR BRI dan BJB: 132 Rumah Tangga
6. Pembangunan SPALD-S IBM Kementerian PU : 288 Rumah Tangga

Menurut Josef Riwu Kaho dalam bukunya yang berjudul Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, keberhasilan dalam suatu program sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaannya. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah tersebut setidaknya ada 4, yaitu:

#### 1) Faktor Manusia

Menurut Josef Riwu Kaho, faktor manusia merupakan sebuah faktor yang esensial atau mendasar dalam berjalannya suatu sistem pemerintahan daerah. Faktor ini menjadi penting karena dalam sebuah pemerintahan manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia juga merupakan penggerak dan juga pelaku dalam menjalankan suatu sistem pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka subjek dan pelakunya ini yaitu manusia harus juga baik. Atau dengan kata lain jika sebuah mekanisme pemerintahan, baik pusat maupun daerah, akan berjalan baik seperti yang diinginkan, apabila subjek dan pelaku yang menggunakannya pun baik. Pengertian baik yang di maksud oleh Josef Riwu Kaho disini meliputi dua hal yaitu:

- a. Memiliki mentalitas atau moral yang baik dalam arti jujur, lalu memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya dan juga dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*.
- b. Memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terlihat bahwa kinerja UPTD dalam pengelolaan sanitasi sangat dipengaruhi oleh faktor manusia. Faktor manusia ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu mentalitas/moral/tanggung jawab sebagai abdi masyarakat dan kemampuan atau kecakapan teknis. Kedua unsur ini tampak kuat dalam berbagai praktik layanan dan operasional UPTD.

Dari sisi moralitas dan tanggung jawab, sebagai bagian dari faktor manusia, UPTD menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan publik. Evaluasi rutin baik evaluasi bulanan maupun monitoring operator setiap tiga bulan menunjukkan adanya budaya kerja yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perbaikan kualitas layanan. Operator dari masyarakat sekitar tidak hanya menangani keluhan secara langsung, tetapi juga menyampaikan laporan bulanan secara konsisten, mencerminkan etika kerja dan moralitas yang baik dalam menjalankan tugas pelayanan.

UPTD juga menyediakan berbagai jalur pengaduan, seperti *call center*, media sosial, dan staf pelayanan khusus, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan dengan mudah. Tindakan cepat terhadap risiko seperti IPAL yang miring dan berpotensi menyebabkan bencana menunjukkan rasa tanggung jawab yang kuat dalam melindungi kepentingan publik. Upaya peningkatan awareness masyarakat terkait sanitasi serta fleksibilitas pembagian tugas berdasarkan urgensi menegaskan bahwa mentalitas pelayanan sebagai abdi masyarakat merupakan kekuatan utama dari faktor manusia dalam unit ini.

Di sisi lain, unsur faktor manusia juga tampak dalam kemampuan atau kecakapan teknis yang dimiliki staf UPTD. Mereka mampu mengoperasikan dan merawat 15 septic tank komunal, melakukan penyedotan limbah sesuai prosedur, serta menjalankan pemeliharaan SPAL dan IPAL termasuk penanaman bakteri. Keterampilan teknis tersebut menunjukkan penguasaan teknis yang memadai dalam bidang sanitasi.

Kemampuan melakukan sampling pada 30 titik air limbah memperlihatkan tingkat kompetensi yang baik dalam pengambilan data teknis dan pengawasan baku mutu lingkungan. Pendataan jaringan pipa, penanganan keluhan teknis seperti sumbatan, serta kerja sama lintas instansi menunjukkan kecakapan operasional dan administratif yang menjadi bagian penting dari faktor manusia dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, kemampuan melakukan perencanaan teknis, termasuk pengembangan dan pemeliharaan IPAL dan septictank komunal, menegaskan bahwa staf memiliki kapasitas profesional yang kuat.

Namun demikian, di balik kekuatan tersebut terdapat tantangan signifikan terkait keterbatasan jumlah SDM. Kekurangan tenaga teknis maupun administratif menyebabkan beban kerja menjadi tidak sebanding dengan kapasitas personel yang tersedia. Satu pegawai sering kali harus memegang beberapa fungsi sekaligus, sehingga muncul risiko kelelahan, keterlambatan penanganan, dan terbatasnya ruang untuk pengembangan inovasi. Fleksibilitas yang selama ini menjadi kelebihan justru berpotensi menjadi kendala ketika kebutuhan mendesak semakin banyak, sementara jumlah pegawai tidak bertambah.

## 2) Faktor Keuangan

Josef Riwu Kaho menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan Otonomi Daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan Keuangan Daerah yang memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

Dalam menjalankan programnya, UPTD SPALD Kota Cimahi mendapatkan anggaran dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi Jawa Barat, dan juga dari APBN yang dikelola oleh satuan kerja pada masing-masing sub sektor dan program. Selain itu, UPTD juga mendapatkan pendanaan dari program *Australia-Indonesia Infrastructure Grants for Sanitation (SAIIG)* untuk sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur air limbah khususnya IPAL Kawasan dengan total anggaran Rp26.728.000.000,00 (Tahun 2020). Selain itu, dana yang didapatkan untuk fokus air limbah juga digunakan untuk pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Septik Tank Komunal/MCK Plus. Selebihnya digunakan untuk kegiatan program pembangunan saluran *drainase*/gorong-gorong, perencanaan pembangunan saluran *drainase*/gorong-gorong, program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai danau dan SDA lainnya, pembangunan kolam/sumur retensi/biopori, pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air, pembangunan saluran drainase sekunder dan rehabilitasi saluran drainase sekunder, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya, dsbnya. (Jawa and Pada 2021).

Meskipun memiliki anggaran yang cukup, UPTD SPALD tidak luput dari kesulitan akibat kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat. Menurut Ibu Septinar selaku Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pemotongan drastis, di mana target sambungan rumah yang biasanya mencapai 700 unit tahun ini turun menjadi hanya 80 unit tahun depan, atau setara dengan 15% dari alokasi sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh pemangkasan langsung pada pagu DAK, sebagaimana dialami banyak daerah lain akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sementara itu, dana APBD mengalami pengurangan relatif yang tidak terlalu signifikan, tetapi tetap berdampak karena akhirnya hanya tersisa 80% dari rencana awal. Dalam menghadapi tantangan ini, UPTD SPALD Kota Cimahi memanfaatkannya sebagai momentum evaluasi internal untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan operasional. Pengelolaan air limbah yang terus berkembang menuntut penyesuaian, terutama dengan adanya pembaruan baku mutu air limbah yang telah direvisi beberapa kali akibat dinamika wacana teknis dan regulasi.

Disamping itu, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengelola SPALD terpadu di Kota Cimahi, UPTD juga menerapkan skema tarif retribusi yang dibedakan berdasarkan kelas pelanggan guna menjamin prinsip keadilan dan kemampuan bayar masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan petugas serta pengguna layanan yang telah kami lakukan, struktur tarif retribusi SPALD Kota Cimahi saat ini adalah sebagai berikut:

- Kelas 1: diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya listrik terpasang di bawah 1.300 VA, dikenakan tarif sebesar Rp150.000,00.
- Kelas 2: diperuntukkan bagi rumah tangga dengan daya listrik terpasang di atas 1.300 VA, dikenakan tarif tetap sebesar Rp240.000,00.
- Kelas 3: diperuntukkan untuk pelanggan non-rumah tangga (termasuk usaha kecil, ruko, kantor, dan fasilitas umum), dikenakan tarif Rp300.000,00.



Gambar 1. Tarif Retribusi UPTD SPALD Kota Cimahi

Adanya perbedaan kelas ini menggunakan daya listrik terpasang sebagai indikator proksi tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga, sehingga pelanggan dari kalangan ekonomi rendah mendapatkan subsidi silang implisit melalui tarif yang lebih ringan, sementara pelanggan non-rumah tangga dan rumah tangga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberlanjutan operasional dan pemeliharaan sistem.

### 3) Faktor Peralatan

Menurut Josef Riwu Kaho<sup>2</sup>, faktor peralatan yang baik adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk membantu atau memperlancar suatu pekerjaan Pemerintah Daerah

<sup>2</sup> Josef Riwu Kaho. (2002). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah / Josef Riwu Kaho.*

sehingga dapat membantu pekerjaan menjadi praktis, efisien serta efektif. Faktor ini mencakup ketersediaan, efisien, serta efektif dalam penggunaannya. Program dapat berjalan dengan baik apabila peralatan yang digunakan dapat memadai, berfungsi baik, serta didukung sistem pemeliharaan yang teratur.

Dalam perkembangan SPALD di Kota Cimahi ter-khususnya faktor peralatan sangat berpengaruh besar sejak awal, yang dimana UPTD SPALD Kota Cimahi sangat bergantung pada ketersediaan peralatan operasional terutama armada penyedot tinja, mesin pengolah, aerator, instalasi SPALD komunal, serta peralatan pemeliharaan lainnya. Peralatan tersebut menjadi bagian yang penting untuk melaksanakan tugas penyedotan domestik, pemeliharaan jaringan, hingga memastikan baku mutu air limbah dapat terpenuhi.

Saat ini UPTD SPALD Kota Cimahi mengoperasikan 15 septic tank komunal dengan hasil kerja bersama antara Indonesia dengan Australia, UPTD juga memiliki empat unit kendaraan penyedot yang dinilai cukup untuk kondisi saat ini, namun tetap perlu pemeliharaan berkala. Pemeliharaan mesin yang dilakukan di UPTD Cimahi selalu dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, termasuk pembersihan alat, pengecatan ulang, serta perbaikan-perbaikan kecil yang diajukan melalui anggaran.

Namun, dalam informasi yang didapat UPTD Cimahi masih terdapat adanya faktor peralatan yang menjadi suatu tantangan. Misalnya, kemampuan selang penyedot yang hanya dapat menjangkau 50 meter sehingga menyebabkan kesulitan layanan di lokasi-lokasi gang sempit ataupun kecil, maka dari itu UPTD berencana melakukan rekondisi tangki agar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh. Selain itu, pengolahan limbah masih terbatas karena belum memiliki IPLT, sehingga peralatan yang ada hanya mendukung kegiatan pengangkutan tetapi belum sampai tahap pengolahan akhir.

Maka dari itu UPTD berencana melakukan rekondisi tangki agar dapat menjangkau jarak yang lebih jauh serta sudah membuat kajian terkait IPLT dan sedang dalam proses lelang tinggal menunggu siapa yang akan menjadi pelaksana pembangunan karena untuk lahannya sudah tersedia dan dana sudah disiapkan oleh Kementerian. Proses pengolahan juga mengalami pembaruan melalui penambahan bakteri secara rutin agar bakteri pengurai di dalam septic tank tetap aktif yang di mana upaya ini didukung oleh penggunaan mesin dan aerator sehingga air limbah dapat diolah dengan lebih optimal.



Gambar 2. Tangki milik UPTD SPALD Kota Cimahi

#### 4) Faktor Organisasi dan Manajemen

Menurut Josef Riwu Kaho<sup>3</sup>, organisasi dan manajemen yang baik menjadi salah satu faktor yang penting juga dengan yang dimaksudkan bahwa organisasi adalah arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang dimaksudkan dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

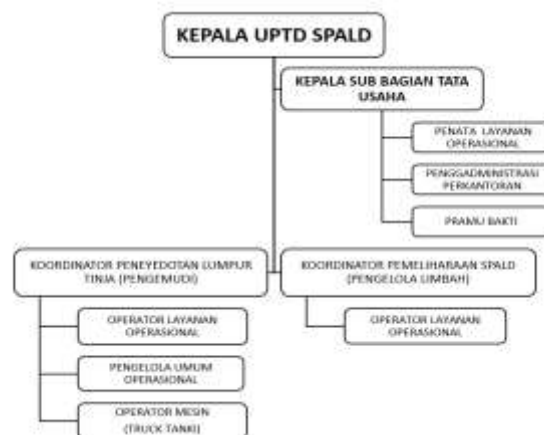
<sup>3</sup> Josef Riwu Kaho. (2002). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah* / Josef Riwu Kaho.



Dalam konteks organisasi, bahwa halnya UPTD SPALD memiliki struktur yang jelas dan teratur dengan struktur mulai dari Kepala UPTD yang memiliki kewenangan untuk menyusun program kerja, menetapkan kebijakan teknis, mengatur SOP penyedotan, hingga memastikan pencapaian sasaran seperti peningkatan baku mutu, pemeliharaan komunal, serta peningkatan PAD melalui retribusi, lalu ada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, hingga kelompok jabatan fungsional seperti koordinator penyedotan lumpur tinja, koordinator pemeliharaan SPALD, operator layanan operasional, pengemudi truk tinja, operator pemeliharaan, serta bagian administrasi seperti penata layanan operasional dan pengadministrasi perkantoran. Dengan adanya struktur ini menggambarkan bahwa setiap bagian sudah memiliki tugas, wewenang, dan alur koordinasi yang sudah terarah dan sudah ada penanggung jawabnya sehingga memudahkan pelaksanaan pelayanan penyedotan, pemeliharaan, dan pengawasan sanitasi.

Dari konteks manajemen, UPTD SPALD Kota Cimahi sudah menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi dengan cukup sistematis. Misalnya, dengan adanya monev rutin per bulan, evaluasi operator per tiga bulan, dan perencanaan anggaran yang dipilah antara kebutuhan dinas dan kebutuhan UPTD. Manajemen operasional juga terlihat dari pengelolaan 15 septic tank komunal, sistem pelaporan keluhan masyarakat melalui call center dan media sosial, serta penyusunan pendataan berkala untuk rumah yang tersambung jaringan. UPTD Kota Cimahi juga mengelola sumber daya manusia yang terdiri dari 21 staf dengan pembagian tugas yang fleksibel sesuai urgensi lapangan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga seperti dengan DPKP, Bapenda, PJMD, dan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa manajemen UPTD Kota Cimahi tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja sama dalam jejaring organisasi pemerintahan lainnya untuk memastikan pelayanan sanitasi berjalan dengan optimal. Hal ini juga diperkuat dengan adanya aturan bahwa setiap kota wajib memiliki UPTD pengelola air limbah, sehingga operasional mereka berada dalam regulasi yang jelas.



Gambar 3. Stuktur Tata Kelola UPTD SPALD Kota Cimahi

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi Program SPALD di Kota Cimahi dengan menggunakan kerangka teori Josef Riwu Kaho yang berisikan 4 faktor yaitu faktor manusia, keuangan, peralatan, serta organisasi dan manajemen, dapat disimpulkan bahwa kinerja UPTD SPALD Kota Cimahi pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hal ini terlihat dari struktur organisasi UPTD yang tertata jelas, pembagian tugas yang terarah, serta pelaksanaan fungsi teknis mulai dari penyedotan lumpur tinja, pengoperasian dan pemeliharaan SPALD komunal, hingga kegiatan monitoring kualitas air limbah. Seluruh kegiatan tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kewenangan yang tercantum dalam Perwal 48/2018.

Di lapangan, UPTD juga menunjukkan konsistensi dalam menjalankan SPALD-S dan SPALD-T, termasuk program SANIMAS yang dibangun untuk meningkatkan akses sanitasi layak. Operasional 15 septic tank komunal, mekanisme pengaduan masyarakat, serta evaluasi



rutin terhadap operator memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan dan pemeliharaan dilaksanakan sebagaimana yang terdapat pada regulasi. Selain itu, penerapan sistem retribusi berbasis kategori pelanggan menggambarkan adanya pengelolaan keuangan yang mendukung keberlanjutan operasional, sejalan dengan ketentuan pendanaan dalam Perwal.

Meskipun demikian, beberapa hambatan masih dihadapi dalam pelaksanaan program. Keterbatasan SDM membuat sebagian pegawai harus menangani lebih dari satu fungsi, sementara beberapa peralatan seperti armada penyedot memiliki jangkauan terbatas sehingga menghambat kinerja di wilayah permukiman padat. Belum adanya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) juga menjadi tantangan penting, karena sistem pengolahan akhir masih belum sepenuhnya mandiri. Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat tentang sanitasi yang belum merata membuat pemanfaatan fasilitas SPALD belum optimal di seluruh kawasan. Secara keseluruhan, UPTD SPALD Kota Cimahi telah menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan Perwal Nomor 48 Tahun 2018, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun pelayanan publik. Namun, efektivitas implementasinya masih bergantung pada peningkatan sumber daya manusia, penambahan fasilitas dan peralatan, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cjmahi, V Tali Kota, Lumpur Tinja, Tambahan Lembaran, Negara Republik, and Tambahan Lembaran Negara. 2009. "WALI KOTA CIMAHI."
- GINANJAR, Y., & HARIKESA, I. W. A. (2021). "IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI AUSTRALIA INDONESIA INFRASTRUCTURE GRANTS FOR SANITATION/SAIIG DI KOTA CIMAHI JAWA BARAT PADA TAHUN 2020-2021" 4:396–409. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.465>
- Josef Riwu Kaho. (2002). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah / Josef Riwu Kaho*.
- PENILAIAN KINERJA IPAL KOMUNAL TERBANGUN DI KOTA CIMAHI. (2023). *Creative Research Journal*, 9(01), 1-14. <https://doi.org/10.34147/crj.v9i1.206>
- PPID Kota Cimahi. 2024. "No Title." *Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024*.
- Zamorano, J. S. (2024). *Identifikasi kualitas air limbah IPAL Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi*. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/3899>